

**STRATEGI KANTOR PERTANAHAN
DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH**
(Studi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Tahap II Tahun 2017 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

HANANG DEWANTORO

NIT. 14232845/P

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
INTISARI.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Hasil Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kerangka Teoritis	6
1. Strategi	6
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	6
3. Metode Analisis SWOT.....	9
4. Hasil Penelitian Terdahulu yang Berkaitan dengan Penelitian.....	11
B. Kerangka Pemikiran	13
BAB III METODE PENELITIAN.....	14
A. Format Penelitian.....	14
B. Lokasi dan Obyek Penelitian.....	14
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	15
D. Definisi Operasional Konsep atau Variabel	15
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	15
F. Analisis Data	23
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	26
A. Gambaran Umum Kabupaten Bogor	26
1. Kondisi Geografis dan administratif.....	26
2. Kondisi Geomorfologis	26
3. Penggunaan Tanah.....	28
4. Pemilikan Tanah	28

	B. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.....	29
	1. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor	29
	2. Kepegawaian.....	30
	3. Pelayanan Pertanahan	31
	4. Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Pertanahan	31
	5. Keuangan	32
BAB V	PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHAP II TAHUN 2017 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR.....	33
	A. Perencanaan dan Persiapan.....	33
	B. Penetapan Lokasi Kegiatan PTSL.....	36
	C. Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL.....	38
	D. Penyuluhan	41
	E. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah.....	42
	F. Pemeriksaan Tanah.....	48
	G. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah Serta Pembuktian Hak	49
	H. Penerbitan Keputusan Pemberian atau Pengakuan Hak Atas Tanah	50
	I. Pembukuan Dan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah.....	52
	J. Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah.....	53
BAB VI	ANALISIS SWOT PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHAP II TAHUN 2017	54
	A. Evaluasi Pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor	54
	1. Tata Laksana.....	54
	2. Sumber Daya Manusia.....	58
	3. Ketersediaan Infrastruktur Keagrariaan.....	59
	4. Koordinasi <i>Stakeholder</i>	60
	5. Pembiayaan PTSL	60
	B. Identifikasi Faktor Kekuatan (<i>Strengths</i>), Kelemahan (<i>Weaknesses</i>), Peluang (<i>Opportunities</i>) dan Ancaman (<i>Threats</i>) dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017.	61
	1. Faktor Kekuatan (<i>Strengths</i>).....	61
	2. Faktor Kelemahan (<i>Weaknesses</i>).....	61
	3. Faktor Peluang (<i>Opportunities</i>)	62
	4. FaktorAncaman (<i>Threats</i>).....	62
	C. Strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2018.....	65
	1. Strategi S-O	65
	2. Strategi S-T	65
	3. Strategi W-O	66
	4. Strategi W-T	67

BAB VII	PENUTUP.....	68
	A. Kesimpulan.....	68
	B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70

ABSTRACT

The acceleration of legalization of assets is carried out through the Complete Systematic Land Registration (PTSL). By 2017 the target of PTSL reaches 5 million plots of land. As part of the national target, the Land Office of Bogor Regency is targeted for 2017 of 97,798 land plots consisting of 17,798 land parcels of Phase I and 80,000 parcels of Phase II. The Land Office of Bogor Regency in addition to the 2017 target of 97,798 plots of land also performs routine services reaching \pm 18,000 applications per month. Land Office of Bogor Regency in completing the existing workload it is necessary to make the right strategy. The strategy implemented was not fully successful. It is necessary to improve the strategy for the implementation of PTSL 2018 which tends to increase. One of the strategies obtained is the SWOT analysis method.

The purpose of this research is to know a) the implementation of complete systematic land registration phase II 2017 in the Land Office of Bogor Regency; b) to know the SWOT analysis of the implementation PTSL phase II 2017 at the Land Office of Bogor Regency in determining the implementation strategy of PTSL in 2018. The research method used is Qualitative Research Method. The approach used in this research is descriptive approach. Data collection is done through document studies, interviews, and observation. Qualitative descriptive data analysis and SWOT Analysis Method.

The results of this research: firstly, that the Head of Land Office has made several policies, namely to make the grand design, coordinate with stakeholders, form 8 Adjudication Teams, establish locations in the Sub-district adjacent to the Office, and submit the physical data collection to KJSKB. the second SWOT Analysis of the implementation of PTSL resulted in 4 sets of strategies associated with 5 aspects of evaluation that are a) management strategy, socialization to the community about land registration and the importance of maintaining land boundary markers; b) SDM strategy, related to the quality of physical data, needs to be improved monitoring and evaluation of KJSKB work, while related to the quality of juridical data, it is necessary to conduct joint adjudication training involving internal and external human resources in order to have a common perception in collecting, processing and assigning rights to soil; c) strategies related to the availability of the agrarian infrastructure, support from relevant agencies should be followed up by increasing cooperation, for example in the future making a single map useful in formulating regional development policies; d) strategies related to stakeholder coordination, undertaking joint movement activities of border marking marks aimed at enabling PTSL to be echoed throughout the District. e) financing-related strategies, additional funding from Local Government and communities should be used appropriately and wisely.

Keywords: Strategy, Complete Systematic Land Registration (PTSL), SWOT Analysis, Bogor District.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam peringatan Hari Agraria Nasional tahun 2016 menyampaikan bahwa, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional memiliki 3 program strategis yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 2016-2019. Ketiga program strategis itu yaitu pertama, percepatan legalisasi aset secara sistematis, kedua percepatan pengadaan tanah untuk mendukung program strategis pembangunan, dan ketiga pelaksanaan Reforma Agraria. Implementasi di lapangan, percepatan legalisasi aset secara sistematis merupakan program strategis yang paling diprioritaskan oleh setiap Kantor Pertanahan. Sehingga sebagian besar Sumber Daya di Kantor Pertanahan dikerahkan untuk menyelesaikan percepatan legalisasi aset ini.

Percepatan legalisasi aset tidak lepas dari masih rendahnya jumlah bidang tanah yang terdaftar di Indonesia. Menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang diperoleh dari www.bpn.go.id (2017) bahwa tanah yang sudah terdaftar di seluruh wilayah Indonesia yaitu 41.800.113 bidang tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Ka BPN) mengatakan bahwa jumlah bidang yang ada di Indonesia yaitu ±130 Juta bidang tanah. Artinya jika dihitung jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar adalah 32,30% dan bidang tanah yang belum terdaftar adalah 67,70% yaitu 88.199.887 bidang tanah.

Percepatan legalisasi aset dilaksanakan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap disingkat PTSL. Pada tahun 2017 target PTSL mencapai 5 juta bidang tanah, kemudian akan meningkat tiap tahunnya sehingga di harapkan pada tahun 2025, seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar seluruhnya. Sebagai bagian dari target nasional maka Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor diberikan target tahun 2017 sebesar 97.798

bidang tanah yang terdiri dari 17.798 bidang tanah Tahap I dan 80.000 bidang tanah Tahap II. Kegiatan Tahap II dimulai bulan juli tahun 2017, pekerjaan tahap II ini harus selesai sampai dengan akhir tahun 2017. Target ini jauh lebih besar dari kegiatan pendaftaran tanah sistematis sebelumnya. Pendaftaran tanah sistematis medio Tahun 1997-2000 setiap tim ditarget 5.000 bidang selama 1 tahun dan tidak dibebani pekerjaan rutin kantor (Guntur dkk, 2017). Sehingga jika di bandingkan dengan target tahun 2017 terjadi kenaikan 1600%.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor di samping target tahun 2017 sebesar 97.798 bidang tanah juga melakukan pelayanan rutin. Pelayanan rutin di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor mencapai ± 18.000 permohonan perbulan atau 216.000 pertahun. Permohonan rutin terdiri dari kegiatan permohonan pekerjaan pendaftaran tanah, permohonan pekerjaan pengukuran tanah, dan permohonan pelayanan informasi. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan oleh pegawai yang berjumlah 150 orang Pegawai Negeri Sipil di tambah 110 tenaga Pegawai Tidak Tetap. Jika di asumsikan hari kerja efektif pertahun 235 hari, maka setiap pegawai memperoleh beban kerja 5 berkas permohonan perhari, padahal permohonan yang ada bervariasi, sehingga dengan latar belakang pendidikan dan jabatan yang berbeda belum tentu bisa menyelesaikan semua jenis permohonan. Tingginya beban kerja ini merupakan permasalahan pertama yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan target PTSL tahap II tahun 2017.

Permasalahan yang kedua yaitu ketersediaan Petugas ukur Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat ASN, jumlah petugas ukur sampai dengan akhir tahun 2017 sejumlah 20 orang, sedangkan jumlah permohonan pengukuran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sebanyak 2000 permohonan perbulan, maka jika di rata-rata setiap petugas ukur mendapat beban kerja 100 permohonan per bulan atau 4 berkas permohonan perharinya.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dalam menyelesaikan beban kerja yang ada maka perlu membuat strategi yang tepat. Agustyarsyah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dalam presentasi pada seminar nasional

pertanahan : “Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia (tantangan pelaksanaan PTSL dan respon solusinya)” yang dilaksanakan di Kampus STPN menjelaskan ada 7 strategi percepatan Pelaksanaan PTSL Tahap II yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, yaitu :

1. membuat Tim Pusdatin Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, tim ini terdiri dari 9 orang, tugasnya yaitu memberikan pelaporan realisasi anggaran PTSL pada aplikasi SKMPP, dan sosialisasi pada media sosial;
2. membuat Rancangan / Buku *Grand Design* PTSL, buku ini berisi segala informasi berkaitan dengan penyelenggaraan PTSL, mulai dari informasi lokasi dan target, susunan tim, langkah koordinasi, rancangan anggaran dan lain-lain;
3. melakukan Koordinasi dengan Instansi Terkait kegiatan PTSL, antara lain Pemerintah Daerah, Kejaksaan Tinggi Negeri, Polres Bogor, DPRD Kabupaten Bogor, Kantor Pajak Pratama, BAPPENDA, Camat, Kepala Desa/Lurah dan Perusahaan Swasta;
4. dukungan Pimpinan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, maupun Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat;
5. membentuk Tim Ajudikasi dan memilih Ketua tim yang berkualitas;
6. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, sehingga terbit Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2017 Tentang Pembebanan Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor. Tujuannya adalah untuk menghindari pungli;
7. melakukan Monitoring dan Evaluasi rutin kepada Tim Ajudikasi, baik itu Satgas Fisik maupun Satgas Yuridis. Kegiatan ini sebagai tindakan menjaga progress capaian kuantitas dan kualitas sertipikat yang dihasilkan Tim Ajudikasi;

Pelaksanaan strategi ini sudah diterapkan sejak awal target tahap II diberikan yaitu bulan Juli 2017. Pelaksanaan sampai dengan Januari 2018 capaian target sertipikat tanah baru mencapai 70.410 bidang tanah atau 88 %. Capaian ini menjadi indikator bahwa strategi yang ada masih belum menjadi solusi penyelesaian PTSL tahap II dari segi kuantitas. Maka Kantor

Pertanahan Kabupaten Bogor perlu melakukan evaluasi pelaksanaan PTSL tahap II tahun 2017. Tujuan evaluasi untuk menentukan perbaikan strategi di tahun 2018.

Salah satu upaya untuk mengetahui perbaikan strategi yang tepat bagi pelaksanaan kegiatan PTSL adalah dengan analisis SWOT. Menurut Fajar Nur'aini Dwi Fatimah (2016), analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis situasi dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis terhadap kekuatan-kekuatan (*strengths*) dan kelemahan-kelemahan (*weaknesses*) suatu organisasi dan kesempatan-kesempatan (*opportunities*) serta ancaman-ancaman (*threats*) dari lingkungan untuk merumuskan strategi organisasi.

Analisis dilakukan kepada beberapa aspek yang mendukung kegiatan PTSL. Penelitian Eko Budi Wahyono dkk (2017) tentang evaluasi PTSL di Provinsi Sumatera Utara setidaknya ada 5 aspek kegiatan yang di analisis terkait evaluasi PTSL, yaitu tata laksana, sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur keagrariaan, koordinasi *stakeholder*, dan pembiayaan PTSL.

Berdasarkan latar belakang yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“STRATEGI KANTOR PERTANAHAN DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH (Studi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahap II Tahun 2017 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahap II Tahun 2017 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana Analisis SWOT Pelaksanaan PTSL tahap II Tahun 2017 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dalam menentukan strategi pelaksanaan PTSL Tahun 2018?

C. Batasan Masalah

Untuk lebih fokus dan optimal dalam penelitian maka peneliti membuat batasan masalah yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
2. Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 tahap II.
3. Penelitian dilakukan terhadap faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
4. Indikator analisis SWOT dibatasi pada 5 aspek yaitu tata laksana, sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur keagrariaan, koordinasi *stakeholder*, dan pembiayaan PTSL.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahap II tahun 2017 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
2. Mengetahui strategi pelaksanaan PTSL tahun 2018 dengan menggunakan analisis SWOT di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

E. Manfaat Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sumbangan pemikiran bagi mahasiswa dan akademisi mengenai teknik analisis SWOT dalam menentukan strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tahapan program PTSL.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bagi Kantor Pertanahan dalam menganalisis pelaksanaan PTSL dengan metode analisis SWOT. Hasil analisis SWOT berupa 4 set strategi perbaikan tahun 2018. Strategi yang dihasilkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, terutama menentukan strategi Kantor Pertanahan dalam percepatan pendaftaran tanah khususnya PTSL.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Bogor diharapkan bisa diselesaikan tepat waktu, disamping tingginya beban kerja rutin. Tahapannya terdiri dari persiapan (Lokasi, anggaran) dan pelaksanaan (pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis, pembukuan dan penerbitan sertipikat), dan penyerahan sertipikat.

1. Guna menyelesaikan target 80.000 bidang tanah di samping beban kerja yang mencapai 18.000 perbulan, Kepala Kantor Pertanahan sudah melakukan beberapa kebijakan, yaitu membuat *grand design*, melakukan koordinasi dengan *stakeholder*, membentuk 8 Tim Ajudikasi, menetapkan lokasi di Kecamatan yang berdekatan dengan Kantor, dan menyerahkan pengumpulan data fisik kepada KJSKB.
2. Berdasarkan evaluasi, segi kuantitas sudah mencapai 88%, akan tetapi dari segi kualitas masih banyak yang belum sesuai aturan yang ada, pertama pencatatan Daftar Isian 201 masih banyak kesalahan serta asas *kontradiktur delimitasi* tidak dipenuhi, kedua pemeriksaan tanah hanya dilakukan di Kantor kelurahan/Desa. Analisis SWOT pelaksanaan PTSL strategi yang dikaitkan dengan 5 aspek evaluasi yaitu :
 - a. Strategi terkait tata laksana,

Melakukan sosialisai kepada masyarakat tentang pendaftaran tanah dan pentingnya memelihara tanda batas bidang tanah, sehingga produk sertipikat yang diterbitkan memiliki kualitas baik sesuai SOP yang ada.
 - b. Strategi terkait SDM,

Terkait dengan kualitas data fisik, perlu ditingkakan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan KJSKB. Sedangkan terkait dengan kualitas data yuridis, perlu melakukan pelatihan ajudikasi bersama yang melibatkan SDM internal maupun eksternal agar mempunyai

persamaan persepsi dalam mengumpulkan, mengolah dan menetapkan hak atas tanah.

c. Strategi terkait Ketersediaan Infrastruktur Keagrariaan,

Dukungan dari instansi terkait perlu di tindaklanjuti dengan meningkatkan kerjasama, misalnya kedepannya membuat Peta Tunggal yang bermanfaat dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah.

d. Strategi terkait Koordinasi *stakeholder*,

Memfaatkan kerjasama yang sudah baik, misal melakukan kegiatan gerakan pemasangan tanda batas bersama yang bertujuan agar PTSL bisa menggema ke seluruh Kabupaten.

e. Strategi terkait pembiayaan,

Dana tambahan dari Pemda dan masyarakat bisa harus digunakan secara bijak, cara membuat perencanaan pembiayaan yang baik agar setiap petugas yang terlibat bisa dibiayai sesuai dengan beban kerjanya.

B. Saran

Rumusan Strategi yang peneliti buat bisa menjadi pertimbangan agar pelaksanaan PTSL tahun 2018 bisa tercapai dari segi kuantitas dan kualitas. Saran yang diberikan agar strategi bisa dilaksanakan dengan berdasar pada pada 5 aspek, yaitu:

1. Aspek Tata Laksana, seluruh tahapan harus dilaksanakan sesuai SOP yang ada, Kantor Pertanahan bisa membuat buku panduan atau video petunjuk teknis tata laksana PTSL, dan sosialisasi melalui media sosial.
2. Aspek SDM ditingkatkan kualitasnya dengan pelatihan serta kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala.
3. Aspek Ketersediaan Infrastruktur Keagrariaan, melakukan pengadaan alat, dan untuk Peta bisa dilakukan integrasi peta pendaftaran dengan peta pajak agar kedepannya bisa terwujud peta tunggal.
4. Aspek Koordinasi *stakeholder*, dilakukan dengan rapat rutin membahas *progress* dan evaluasi agar kekurangan yang ada bisa segera di benahi.
5. Aspek pembiayaan, melibatkan Tim Ajudikasi dalam melakukan penganggaran pembiayaan tenaga yang terlibat kegiatan PTSL.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Ar'Radif, M. Novi, 2014. *Analisis SWOT Dalam Menentukan Strategi Pemasaran Pada Cv. Cidiach Creative Kutai Kartanegara*. eJournal Ilmu Administrasi Bisnis, 2014, 2(3):469-482
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Dimiyati, H., Nurjaman, K., 2016, *Manajemen Proyek*, Cetakan Kedua, Pustaka Setia, Bandung.
- Freddy, Rangkuti. 2017. *Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis, cara perhitungan Bobot, Rating dan Ocai*, Cetakan Keduapuluh tiga, Jakarta: PT. Gramedia
- Guntur, I Gusti Nyoman., Suharno., Supriyanti, Therezia. 2017, *Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Dan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.*, Laporan Penelitian Sistematis STPN, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi. (1999). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaan*. Jakarta: Djambatan.
- Nugroho, A. (2012). *Pengetahuan Ringkas Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: STPN Press.
- Nugroho, A. (2016). *Handbook Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta.
- Nur'aini D.F, Fajar 2016, *Teknik Analisis SWOT Pedoman Menyusun Strategi yang Efektif dan Efisien serta Cara Mengelola Kekuatan dan Ancaman*, Quadrant, Yogyakarta.
- Sitanggang, Fransiskus T.M. 2017. *Problematika Percepatan Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara*. Yogyakarta, Skripsi DIV Pertanahan.
- Sugiyono, 2016 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.
- Suharno., Budhiawan, Haryo., Suhattanto, Muh Arif. 2016, *Identifikasi Permasalahan Proses Pendaftaran Tanah dan Upaya Perbaikannya Dalam Rangka Percepatan Proses Pendaftaran Tanah di Indonesia (Studi Khusus Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Provinsi Jawa Timur.*, Laporan Penelitian Sistematis STPN, Yogyakarta.

Wahyono, Eko Budi., Wahyuni., Suhattanto, Muh Arif. 2017. *Evaluasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Provinsi Sumatera Utara*. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap : Proses dan Evaluasi Program Prioritas (Hasil Penelitian Sistematis 2017). Yogyakarta STPN Press.

Yunus, Hadi Sabari. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Indonesia;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017, Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis

Petunjuk Teknis Nomor: 01/JUKNIS-400/XII/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis

Petunjuk Teknis Nomor: 345/2.1-100/I/2017 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Petunjuk teknis Nomor: 03/JUKNIS 300/VII/2017 tentang Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap

Petunjuk teknis Nomor: 01/JUKNIS-300/I/2018 tentang Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018.

Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pembebanan Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bogor

Website

www.bpn.go.id